

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait peran dan fungsi lembaga penyuluhan pertanian (perkebunan) dalam pembangunan pertanian di Kecamatan Panceng:

1. Peran lembaga penyuluhan pertanian dalam aspek pelayanan dan komunikasi dengan petani di Kecamatan Panceng belum optimal, ditunjukkan oleh frekuensi kunjungan penyuluh yang sangat rendah (rata-rata 1,3 kali per kelompok per tahun), serta pola komunikasi yang masih top-down dan minim kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti perguruan tinggi, pelaku pasar, dan lembaga penelitian.
2. Pelaksanaan fungsi kelembagaan penyuluhan menghadapi berbagai kelemahan, antara lain: perencanaan tidak berbasis kebutuhan petani, penyediaan informasi yang terbatas, rendahnya capaian pengembangan SDM akibat minimnya anggaran, administrasi yang tidak tertata, serta tidak berjalannya sistem monitoring dan evaluasi. Kondisi ini menghambat efektivitas layanan penyuluhan dan kontribusinya terhadap pembangunan pertanian.
3. Faktor-faktor penghambat utama bersifat struktural dan sosial, termasuk kekurangan tenaga penyuluh dan mismatch kompetensi, minimnya alokasi anggaran, ketiadaan regulasi dan arah kebijakan yang jelas, serta rendahnya minat regenerasi petani muda. Dampaknya terlihat dari stagnasi produktivitas, penurunan luas panen, dan meningkatnya degradasi lingkungan, yang menunjukkan adanya kesenjangan besar antara kondisi ideal dan realitas di lapangan.

6.2 Saran

1. Pemerintah daerah perlu merevitalisasi sistem penyuluhan pertanian melalui penyusunan regulasi daerah, peningkatan anggaran secara

signifikan, pembentukan balai penyuluhan tingkat kecamatan, serta rekrutmen dan pengembangan SDM penyuluh dengan pelatihan intensif dan insentif berbasis kinerja. Pengembangan penyuluhan berbasis teknologi digital juga penting untuk meningkatkan jangkauan dan efisiensi layanan.

2. Lembaga penyuluhan didorong untuk mentransformasi pendekatan menjadi partisipatif dengan melibatkan petani dalam perencanaan program, mengoptimalkan sumber daya melalui sistem penyuluhan kelompok, pelibatan petani maju sebagai penyuluh swadaya, serta menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset. Perbaikan sistem administrasi dilakukan melalui digitalisasi pencatatan, pembaruan database berkala, dan sistem monitoring berbasis outcome.
3. Petani dan kelompok tani diharapkan lebih proaktif dalam mengakses informasi dan teknologi secara mandiri, memperkuat kelembagaan kelompok melalui aktivitas bersama dan kolaborasi, serta memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran dan jaringan antar petani.
4. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengembangkan model penyuluhan digital yang sesuai karakter petani lokal, studi komparatif sistem penyuluhan unggul dari daerah lain, analisis dampak ekonomi dari investasi penyuluhan, dan strategi regenerasi petani melalui pendekatan inovatif.